



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN APARATUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF MUSTOFA
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 808438

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.165.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 630 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
2. Tanah Seluas 1448 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Bangunan Seluas 49.94 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
5. Tanah Seluas 1025 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 855.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HARLEYDAVIDSON STREET GLIDE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOBIL, JEEP WRANGLER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	792.063.952
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.847.063.952
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.847.063.952

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.